

## ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSI PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2012-2016

I Made Gede Sancita Wiguna<sup>1</sup>  
Made Kembar Sri Budhi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
E-mail: [wiguna.sancita@gmail.com](mailto:wiguna.sancita@gmail.com)

### ABSTRAK

Objek penelitian ini adalah analisis sektor unggulan dan potensi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung yang datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung dan Provinsi Bali. Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif berbentuk deskriptif untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul. Penelitian ini menggunakan dua analisis, yaitu teknik analisis *Location Quotient (LQ)* dan *Shift Share*. Analisis secara kualitatif digunakan untuk mengetahui apakah faktor potensial tersebut dapat digunakan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung. Sektor basis yang terdapat di Kabupaten Badung, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor konstruksi; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi. Sektor potensial yang dapat dikembangkan di Kabupaten Badung adalah sektor pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; real estate; jasa perusahaan; industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi. **Kata kunci:** sektor basis, sektor potensial, pertumbuhan ekonomi

### ABSTRACT

*The object of this research is the analysis of leading sectors and the potential for economic growth in Badung Regency whose data is obtained from the Central Statistics Agency of Badung Regency and Bali Province. This study uses a quantitative approach in the form of descriptive to analyze by describing the data collected. This study uses two analyzes, namely Location Quotient (LQ) and Shift Share analysis techniques. Qualitative analysis is used to determine whether these potential factors can be used in determining economic growth in Badung Regency. Base sector found in Badung Regency, namely. agriculture, forestry and fisheries sector; sector of water supply, waste management, waste and recycling; construction sector; transportation and warehousing sector; the sector of providing accommodation and eating drinks; information and communication sector. Potential sectors that can be developed in Badung Regency are electricity and gas procurement sectors; wholesale and retail trade, car and motorcycle repair; real estate; company services; processing industry; financial and insurance services. **Keywords:** base sector, potential sector, economic growth*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dalam segala bidang kehidupan, salah satunya adalah di bidang perekonomian. Suatu negara dapat di kategorikan menjadi negara yang berkembang jika dapat memberikan kehidupan yang layak bagi warganya (Lawal dan Oluwatoyin, 2011). Perkembangan suatu negara bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan kekuatan ekonomi nasional berasal dari kekuatan ekonomi regional (Mapa dkk, 2009).

Pembangunan menjadi suatu proses kegiatan yang dianggap penting dan wajib dilaksanakan oleh semua negara, karena globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan telah berdampak pada perubahan dan pembaruan dalam semua aspek kehidupan manusia (Asih, 2015). Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah (Arsyad, 1999: 298).

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup kapan, dimana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu merangsang pertumbuhan

ekonomi yang berkesinambungan. Pembuat rencana pembangunan haruslah mampu untuk memprediksi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan yang akan dilakukan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang (Tinambunan, 2007 dalam Pratomo, 2010). Dalam perencanaan pembangunan ekonomi suatu wilayah, saat ini perhatian diberikan tidak hanya pada perekonomian wilayah secara umum, namun perhatian yang mendalam perlu juga diberikan kepada upaya untuk melakukan identifikasi sektor unggulan. Sektor unggulan dalam hal ini merupakan sektor basis yang dapat memberikan aliran pendapatan ke dalam perekonomian suatu wilayah (Richardson, 1979).

Menurut Almulaibari (2011), krisis yang melanda Indonesia sejak periode 1997, membawa dampak negatif ke dunia perekonomian nasional umumnya, dan perekonomian regional khususnya. Krisis ini menyebabkan terjadinya perubahan dari nilai tambah sektor-sektor yang ada di wilayah nasional juga di wilayah daerah. Sebagai suatu negara yang terbagi atas banyak daerah, penyelenggaraan pembangunan ekonomi di Indonesia dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing, sesuai dengan potensi dan aspirasi yang dimiliki masyarakatnya. Pamuji (2011), mengatakan bahwa suatu daerah dituntut untuk mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki sebagai modal untuk pembangunan daerahnya.

Pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi atau disebut otonomi daerah merupakan babak baru dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Beberapa

kebijakan dalam otonomi daerah, dibuat sebagai sarana peningkatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan pendapatan per kapita dapat meningkatkan potensi sehingga mengurangi kemiskinan (Miranti, 2014). Kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah dalam pembangunan harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Penentuan kebijakan-kebijakan dalam proses pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan makmur untuk masyarakat yang berada pada suatu wilayah (Oka, 2015). Kebijakan lain sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat salah satunya melalui kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan upaya untuk memaksimalkan eksploitasi sumber daya yang disesuaikan dengan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Kusuma, 2016). Diperlukan penanganan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui strategi dan penetapan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tepat (Demuger, 2011).

Pengambilan keputusan oleh pemerintah lokal akan lebih didengar dalam memenuhi pilihan lokal yang bermacam-macam, sehingga lebih bermanfaat bagi efisiensi alokasi (Fajrii, 2016). Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Apabila angka kematian mengalami penurunan maka akan

membantu pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya mengarah kepada peningkatan standar hidup masyarakat (Dao, 2012). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi (Saerofi, 2005). Pertumbuhan ekonomi adalah alat ukur dari sebuah pembangunan, hal ini dikarenakan perkembangan aktivitas sektor ekonomi dapat juga diukur melalui pertumbuhan ekonomi (Sugiarthi dan Suparmi, 2014). Tingkat pertumbuhan yang signifikan sering dikaitkan dengan negara-negara yang menganut globalisasi yang sedang berlangsung dan meningkatkan keterbukaan internasional, pertukaran barang dan jasa, serta ide-ide dan teknologi (Andersen dan Babula, 2008).

Menurut UU No. 32 tahun 2004 yang kemudian diganti dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan, sedangkan dalam hal pembiayaan dan keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, tidak hanya kesiapan aparat pemerintah saja tetapi juga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah dengan pemanfaatan sumber-sumber daya secara optimal. Pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana tujuan penyelenggaraan otonomi

daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut kreatif dalam mengembangkan perekonomian, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Investasi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat menimbulkan *multiplier effect* terhadap sektor-sektor lainnya. Pembangunan infrastruktur akan mendorong investasi baik itu dari badan usaha milik negara maupun luar negeri (Feltenstein, 2005). Adanya otonomi daerah diharapkan bagi seluruh daerah untuk dapat berdiri sendiri dalam menjalankan kebijakan yang telah diambil, dengan kata lain, otonomi daerah bertujuan untuk membentuk kemandirian atau mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat Indonesia (Kesuma, 2015). Namun, dalam menjalankan otonomi daerah tersebut, hal utama yang menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah daerah adalah dimiliki oleh daerah yang diembannya. Daerah yang telah mengetahui dengan benar potensi yang dimiliki daerahnya, maka akan dapat memanfaatkan potensi tersebut demi keberlangsungan perekonomian daerahnya. Berbeda halnya dengan daerah yang tidak mengetahui dengan benar potensi yang dimiliki, maka pemerintah daerah tidak dapat secara optimal dalam memanfaatkan yang menjadi potensi di daerahnya.

Suatu daerah dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mengembangkan sektor yang bisa menjadi andalan / unggulan daerah tersebut. Sektor andalan / unggulan ini perlu ditentukan oleh suatu daerah karena setiap

daerah mempunyai karakter yang berbeda baik dari sisi kesuburan lahan, letak geografis, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana yang ada. Masing-masing daerah memiliki keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda yang ditunjukkan dengan pertumbuhan dan peran sektor-sektor yang bersangkutan. Identifikasi dan klasifikasi sektor diperlukan untuk memberikan gambaran sektor mana yang aktifitasnya menjadi basis perekonomian atau unggulan, potensial, sedang berkembang dan mana pula yang tertinggal, sehingga dapat dilakukan penentuan sektor prioritas. Pemerintah perlu mengidentifikasi dan menganalisis sektor yang menjadi sektor potensial, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan di daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah (Aryanti, 2009). Berdasarkan sektor basis, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan dan strategi pembangunan agar pembangunan sektor perekonomian di daerah dapat berjalan dengan optimal (Hardyanto, 2014).

Kabupaten/kota di Provinsi Bali masing-masing mempunyai keunggulan yang tergantung pada letak wilayah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Perbedaan struktur perekonomian dari setiap daerah mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam merencanakan kebijakan perekonomian. Setiap daerah juga harus menentukan sektor-sektor yang sesuai dengan kemampuan daerahnya, yaitu sektor-sektor yang mempunyai keunggulan.

Sektor unggulan umumnya dicerminkan oleh sektor basis yang dimiliki setiap kabupaten/kota dimana sektor tersebut memiliki peranan ekspor sehingga tidak ada keterbatasan permintaan dan dapat terus dikembangkan. Sektor basis dapat dijadikan andalan untuk mengembangkan wilayah, sehingga dapat dipilih

sektor unggulan dari sektor basis yang ada di setiap kabupaten/kota. Sektor unggulan ini, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

Sambodo (dalam Firman, 2007), ciri-ciri sektor yang memiliki keunggulan adalah sebagai berikut:

1. Sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
2. Sektor tersebut memiliki angka penyebaran yang relatif besar.
3. Sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik keterkaitan depan ataupun ke belakang.
4. Sektor tersebut mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian (Ayu dan Wiagustini, 2016) potensi ekonomi daerah di Provinsi Bali perkabupaten/kota menggunakan analisis Tipologi Klassen, bahwa sektor unggulan yang sama di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2012-2015 adalah sektor konstruksi, sektor berkembang adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial; sektor potensial adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; dan sektor terbelakang adalah sektor pengadaan air, pengelolaan limbah, sampah dan daur ulang; sektor pengadaan listrik dan gas.

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan otonomi daerah dan merupakan penyumbang kue ekonomi terbesar di Provinsi Bali. Tanpa mengesalkan arti dari kabupaten yang lainnya, Kabupaten Badung mampu berperan hampir seperempat dari keseluruhan ekonomi yang dihasilkan di Provinsi Bali. Kontribusi tersebut cukup dominan dalam perekonomian Bali. Bali sebagai salah satu objek wisata dunia, memang memiliki daya tarik yang sangat besar bagi



kunjungan para wisatawan. Badung sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki potensi wisata cukup besar, baik potensi wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, wisata remaja maupun penunjang pariwisata seperti penyediaan akomodasi dan makan minum. Setidaknya terdapat 36 objek wisata yang ada di Kabupaten Badung, diantaranya adalah wisata pantai, pura, Garuda Wisnu Kencana (GWK), monumen tragedi kemanusiaan di Kuta dan lain sebagainya. (BPS Kabupaten Badung, 2017).

Pada era otonomi daerah paradigma baru dalam pembangunan daerah, keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya diukur dari kemajuan fisik yang diperoleh atau berapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diterima. Keberhasilan pembangunan harus dapat diukur dengan parameter yang lebih luas dan lebih strategis yang meliputi semua aspek kehidupan baik materil dan non materil. Untuk mengetahui potensi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung diperlukan suatu metode yang berguna untuk mengkaji dan memproyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan yang ada.

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi daerah dapat diukur dengan beberapa indikator yang lazim digunakan sebagai alat ukur. Indikator yang lazim digunakan adalah produk domestik regional bruto (PDRB) yang bisa menjadi petunjuk kinerja perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah. Indikator lain adalah tingkat pertumbuhan, pendapatan perkapita dan pergeseran atau perubahan struktur ekonomi (Sjafrizal, 2008).

Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis adalah fungsi permintaan yang bersifat exogenous (tidak tergantung pada kekuatan intern/permintaan lokal), sedangkan kegiatan non basis adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, karena itu permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kenaikan pendapatan masyarakat setempat. Jadi, sektor ini terikat terhadap kondisi ekonomi setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Atas dasar anggapan di atas, satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiah adalah sektor basis. Oleh karena itu analisis basis sangat berguna untuk mengkaji dan memproyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah (Tarigan, 2004).

Untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi regional serta meningkatkan kontribusinya terhadap pembentukan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka pembangunan sektor unggulan dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan ekonomi. Secara umum tujuan pembangunan bidang ekonomi khususnya sektor unggulan adalah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan demikian dapat tercipta stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, dan tercipta kemakmuran dan kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat daerah tersebut. Menurut Janaranjana Herath, dkk (2011), analisis pertumbuhan ekonomi oleh sektor dari daerah tertentu membantu para pembuat kebijakan, tokoh masyarakat, dan peneliti dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah dengan lebih baik. Salah satu indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk

mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB merupakan indikator penting di suatu wilayah yang dapat mengindikasikan totalitas produksi netto barang/jasa yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan wilayah. PDRB adalah nilai pasar semua produk dan jasa yang dihasilkan oleh orang-orang dan properti dari negara tertentu, untuk jangka waktu satu tahun (Afzal, 2007). Menurut Tarigan (2007:24), PDRB dapat dibedakan menjadi dua yaitu PDRB atas harga berlaku dan harga konstan. Nilai total *output* atau nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor (lapangan usaha) berdasarkan harga-harga selama tahun berjalan disebut sebagai PDRB atas dasar harga berlaku sedangkan nilai total *output* atau nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor (lapangan usaha) berdasarkan harga pada tahun dasar disebut dengan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

**Tabel 1.**  
**Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2016 (Persen)**

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8.13	7.27	7.60	7.48	7.20
Pertambangan dan Penggalian	0.41	0.41	0.39	0.35	0.33
Industri Pengolahan	4.47	4.53	4.67	4.75	4.65
Pengadaan Listrik, Gas	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21
Pengadaan Air	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30
Konstruksi	10.31	10.22	9.85	9.66	9.66
Perdagangan	7.28	7.42	7.55	7.67	7.57
Transportasi & Pergudangan	18.94	18.81	18.06	17.45	17.82
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25.46	25.84	25.98	26.18	26.13
Informasi dan Komunikasi	7.59	7.51	7.62	7.80	7.96
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.72	2.87	2.99	3.05	3.07
Real Estate	3.93	3.94	4.06	4.12	4.06
Jasa Perusahaan	0.77	0.79	0.80	0.81	0.80
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.16	3.89	4.09	4.21	4.25
Jasa Pendidikan	3.20	3.40	3.57	3.64	3.65
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.27	1.34	1.43	1.48	1.50
Jasa Lainnya	0.81	0.79	0.81	0.82	0.84
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Badung 2012-2016

Peranan setiap sektor ekonomi dalam perekonomian dapat diketahui dari angka distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) seperti yang dapat dilihat melalui Tabel 1. Sektor ekonomi tidak hanya berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat penyerapan kerja, tetapi juga berperan penting terhadap laju pertumbuhan ekonomi (Suharyadi, dkk, 2012). Kabupaten Badung memiliki karakteristik yang unik yang berbeda dengan daerah lain di Bali. Perekonomian Badung dibangun dengan mengandalkan pariwisata

yang diwakili penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai *leading sektor*, didukung oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Hal ini juga tercermin dari besarnya sumbangan kedua lapangan usaha tersebut pada PDRB Badung.

Berdasarkan Tabel 1 lapangan usaha penyumbang nilai tambah terbesar di Kabupaten Badung adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Kategori lapangan usaha ini mengalami peningkatan selama periode 2012-2016 dan pada tahun 2016 mencapai sebesar 26,13 persen. Kunjungan wisatawan yang mencapai 4,93 juta orang pada tahun 2016 menjadi salah satu faktor meningkatnya nilai tambah yang dihasilkan pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum (BPS Kabupaten Badung, 2017). Kemudian disusul dengan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 17,82 persen. Sementara sektor pengadaan listrik, gas merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peranan paling rendah dalam perekonomian Kabupaten Badung pada tahun 2016 sebesar 0,21 persen.

Berdasarkan BPS Kabupaten Badung (2017), selama periode tahun 2012-2016 struktur perekonomian Badung tidak banyak mengalami perubahan yang berarti. Tabel 1 memperlihatkan 2 (dua) kategori penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Badung yakni sektor pariwisata dan sektor transportasi dan pergudangan. Sektor pariwisata Badung yang diwakili oleh penyediaan akomodasi dan makan minum selama tahun 2012-2016 sumbangannya mengalami kecenderungan meningkat. Hal yang sebaliknya terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang justru mengalami kecenderungan menurun.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor konstruksi; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi merupakan sektor unggulan di Kabupaten Badung.

H2: Sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; sektor real estate; sektor jasa keuangan dan asuransi dan sektor jasa perusahaan merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk deskriptif, yaitu menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul pada wilayah tertentu. Pendekatan kuantitatif lebih cocok digunakan pada penelitian ini karena untuk mengidentifikasi dan menganalisis sektor unggulan dan potensi pertumbuhan ekonomi dengan cara mengukur variabel-variabel yang terkait berdasarkan PDRB sektoral untuk mengungkap kecenderungan dan membuktikan secara matematis sederhana berbagai data yang bersifat kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui sektor unggulan dan potensi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung yaitu *Location Quotient (LQ)* dan *Shift Share*.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Badung Provinsi Bali, dengan menghitung data PDRB menurut lapangan usaha tahun 2012-2016 atas dasar harga konstan tahun 2010. Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Badung dikarenakan Kabupaten Badung merupakan Kabupaten yang memiliki distribusi PDRB tertinggi di Provinsi Bali. Distribusi persentase Kabupaten Badung disumbangkan oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran karenanya perlu adanya sektor-sektor potensial yang lain yang perlu dikembangkan mengingat kejadian yang pernah mengguncang pariwisata Bali.

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali menurut lapangan usaha tahun 2012-2016 atas dasar harga konstan tahun 2010. 2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Badung menurut lapangan usaha tahun 2012-2016 atas dasar harga konstan tahun 2010. 3) Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali menurut lapangan usaha tahun 2012-2016 atas dasar harga konstan tahun 2010. 4) Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Badung menurut lapangan usaha tahun 2012-2016 atas dasar harga konstan tahun 2010.

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan *Location Quotient* (LQ). *Location Quotient* (LQ) adalah suatu metode untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah (Kabupaten/Kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah yaitu membaginya menjadi dua golongan yaitu sektor basis

dan sektor non basis. *Location Quotient* adalah sebuah alat ukur sederhana yang berdasarkan data dari nilai tambah (Mack, 1996). Menurut Hood (1998), *Location Quotient* adalah suatu alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan. Analisis LQ dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi dan pergeseran sektor-sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan wilayah.

Perhitungan LQ menggunakan rumus sebagai berikut : (Arsyad, 2010)

$$LQ = \frac{\frac{S_i}{S}}{\frac{N_i}{N}} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

- LQ : Nilai Location Quotient
- S<sub>i</sub> : *Share* PDRB Sektor i di Kabupaten Badung
- S : PDRB total di Kabupaten Badung
- N<sub>i</sub> : *Share* PDRB Sektor i di Provinsi Bali
- N : PDRB total di Provinsi Bali

Kemudian menggunakan Teknik analisis *shift share* yang mengkombinasikan data ekonomi nasional dan ekonomi daerah disebut dengan analisis *shift share* (Wali I. Mondal, 2009). Analisis *shift share* digunakan untuk menganalisis kinerja perekonomian daerah (Arsyad, 2010:389). Analisis *shift share* juga digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi suatu daerah sebagai perubahan atau peningkatan suatu indikator pertumbuhan perekonomian suatu



wilayah dalam kurun waktu tertentu (Basuki, 2009). Menurut Habibullah (2009), analisis *shift share* sering digunakan untuk mengukur perkembangan *output* melalui perbandingan *output* regional dan nasional berdasarkan kurun waktu tertentu.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

*Location Quotient (LQ)* merupakan suatu pendekatan tidak langsung yang digunakan untuk mengukur kinerja basis suatu daerah. Analisis *Location Quotient (LQ)* dapat digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sektor-sektor ekonomi yang termasuk dalam sektor unggulan (Arsyad, 2010: 390). Kontribusi masing-masing kegiatan ekonomi sudah diketahui dari nilai masing-masing sektor. Jika kontribusi kabupaten/kota lebih tinggi atau lebih besar dari kontribusi sektor tersebut di provinsi, maka sektor yang bersangkutan dikategorikan sebagai sektor potensial yang dimiliki oleh suatu wilayah yang bersangkutan.

**Tabel 2.**  
**Hasil Analisis *Location Quotient (LQ)* Sektor-Sektor Ekonomi di Kabupaten Badung Tahun 2012-2016**

No.	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.13	0.51	0.51	0.52	0.51	1.44 (b)
2	Pertambangan dan Penggalian	0.30	0.30	0.03	0.31	0.31	0.25 (nb)
3	Industri Pengolahan	0.69	0.68	0.69	0.70	0.70	0.69 (nb)
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.98	0.98	0.96	0.96	0.96	0.97 (nb)
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.34	1.34	1.35	1.37	1.35	1.35 (b)
6	Konstruksi	1.04	1.04	1.05	1.04	1.03	1.04 (b)
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.85	0.85	0.86	0.86	0.85	0.85 (nb)

*Sumber:* Data diolah, 2018

Tabel 3.

**Hasil Analisis *Location Quotient (LQ)* Sektor-Sektor Ekonomi di Kabupaten Badung Tahun 2012-2016 (lanjutan)**

No.	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
8	Transportasi dan Pergudangan	2.54	2.52	2.44	2.39	2.41	2.46 (b)
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.32	1.32	1.33	1.34	1.33	1.33 (b)
10	Informasi dan Komunikasi	1.17	1.32	1.18	1.17	1.17	1.20 (b)
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.65	0.69	0.70	0.72	0.71	0.69 (nb)
12	Real Estate	0.83	0.83	0.84	0.86	0.86	0.84 (nb)
13	Jasa Perusahaan	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	0.74 (nb)
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.67	0.67	0.68	0.69	0.70	0.68 (nb)
15	Jasa Pendidikan	0.68	0.68	0.69	0.69	0.67	0.68 (nb)
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.64	0.64	0.65	0.66	0.65	0.65 (nb)
17	Jasa lainnya	0.52	0.52	0.53	0.53	0.53	0.53 (nb)

Sumber: Data diolah, 2018

Keterangan : (b) : sektor basis  
(nb) : sektor non basis

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa Kabupaten Badung memiliki 6 sektor basis dengan LQ rata-rata lebih besar dari 1 ( $LQ > 1$ ) yaitu : Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,44; kemudian sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,35; sektor Kontruksi 1,04; Transportasi dan Pergudangan sebesar 2,46; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1,33; sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 1,20.

Sektor basis ditunjukkan oleh besarnya *Location Quotient (LQ)*. Sektor-sektor ekonomi yang telah disebutkan di atas merupakan sektor basis, karena hasil perhitungan *LQ* menunjukkan angka lebih dari satu ( $>1$ ), atau dengan kata lain kontribusi sektor pada tingkat kabupaten/kota lebih tinggi dari kontribusi sektor di tingkat provinsi.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor basis, namun pada tahun 2015 hingga 2016, *LQ* sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan. Penurunan *LQ* sektor pertanian di Kabupaten Badung disebabkan oleh berkurangnya lahan pertanian di Kabupaten Badung, sehingga kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi menurun. Seperti pada penelitian Kesuma (2015), menyatakan bahwa sektor pertanian memiliki nilai negatif, sehingga di Kabupaten Klungkung mengalami pergeseran struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor jasa. Sektor pertanian yang bergeser ke sektor modern juga didukung oleh Ridhwan (2013) yang menyatakan bahwa perkembangan daerah tidak akan bisa terlepas dari adanya perkembangan sektor-sektor ekonominya. Sektor pertanian memiliki perubahan internal di sektor pertanian maupun perubahan eksternal yang berhubungan dengan sektor-sektor ekonomi yang lainnya pada suatu daerah. Perubahan eksternal merupakan penurunan peran sektor pertanian dalam kontribusinya terhadap PDRB di suatu daerah atau PDB dalam suatu wilayah nasional, maupun dilihat dari penurunannya dalam penyerapan tenaga kerja dari sektor tersebut (Wiwekananda, 2016).

Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang adalah sektor basis. Sektor ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di Kabupaten Badung di sumbangkan seluruhnya dari sub sektor pengadaan air dan pengelolaan sampah lainnya. Pengadaan air dan pengelolaan

sampah lainnya itu adalah pemanfaatan air bawah tanah dan pengelolaan sampah secara maksimal. Dilihat pada data hasil olahan  $LQ$ , sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang pada tahun 2015 hingga tahun 2016 mengalami penurunan. Ini disebabkan oleh dampak dari adanya peraturan pemerintah daerah yang membatasi penggunaan air bawah tanah.

Sektor konstruksi menjadi sektor basis di Kabupaten Badung, karena memiliki nilai  $LQ > 1$ . Sektor konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Sektor konstruksi berperan penting di Kabupaten Badung, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung 2016, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung menurut lapangan usaha tahun 2012-2016, kontribusi konstruksi mencapai 6.8 persen di tahun 2016. Selama tahun 2012-2016, laju pertumbuhan tertinggi sektor konstruksi terjadi di tahun 2015 ke tahun 2016 yang mencapai 6.8 persen (lampiran 5). Jadi sektor konstruksi memberikan peran yang penting bagi perekonomian.

Sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor yang nilai  $LQ$  rata-ratanya paling tinggi yaitu sebesar 2,46. Sektor Transportasi dan Pergudangan memiliki peranan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung, karena Kabupaten Badung memiliki jalur transportasi udara. Keberadaan Bandar Udara (*airport*) I Gusti Ngurah Rai menjadi tempat berlabuhnya pesawat udara yang membawa ratusan ribu penumpang dari berbagai negara. Jadi wajar apabila sektor transportasi dan pergudangan menjadi salah satu sektor basis, karena sektor

ini memberikan nilai tambah yang cukup besar bagi perekonomian di Kabupaten Badung.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan sektor basis, namun pada tahun 2015 hingga 2016,  $LQ$  sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami penurunan. Penurunan  $LQ$  sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kabupaten Badung disebabkan oleh berkurangnya kunjungan wisatawan di Kabupaten Badung, sehingga kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi menurun.

Sektor informasi dan komunikasi menjadi sektor basis di Kabupaten Badung, karena memiliki nilai  $LQ > 1$ . Sektor informasi dan komunikasi berperan penting di Kabupaten Badung, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung 2016, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung menurut lapangan usaha tahun 2012-2016, kontribusi sektor informasi dan komunikasi mencapai 8.97 persen di tahun 2016. Selama tahun 2012-2016, laju pertumbuhan tertinggi sektor informasi dan komunikasi terjadi di tahun 2015 ke tahun 2016 yang mencapai 8.97 persen (lampiran 5). Jadi sektor informasi dan komunikasi memberikan peran yang penting bagi perekonomian.

Pada sektor basis ini penyerapan tenaga kerjanya lebih banyak dibandingkan dengan sektor non basis, terutama pada Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan sektor yang lainnya mengingat sebagian besar penduduk di Kabupaten Badung bekerja pada sektor pertanian sebagai petani.

Kabupaten Badung juga memiliki 11 sektor non basis diantaranya Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 0,25; Industri Pengolahan sebesar 0,69; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,97; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,85; Real Estate sebesar 0,84; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,69; Jasa Perusahaan sebesar 0,74; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,68; Jasa Pendidikan sebesar 0,68; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,65; dan sektor Jasa Lainnya sebesar 0,65. Hal ini menunjukkan bahwa 11 sektor tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan dalam Kabupaten Badung. Pada sektor non basis ini penyerapan tenaga kerjanya cenderung lebih sedikit dibandingkan sektor basis karena pada sektor non basis tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus atau kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masing-masing sektor non basis.

Namun diantara sektor non basis tersebut terdapat beberapa sektor yang nilai LQ rata-ratanya mendekati satu diantaranya Sektor Pengadaan Listrik dan Gas (0,97); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (0,85); Real Estate sebesar (0,84); Jasa Perusahaan sebesar (0,74); Industri Pengolahan (0,69); Jasa Keuangan dan Asuransi (0,69), sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Badung dan diharapkan mampu menjadi sektor unggulan baru karena nilai LQ rata-ratanya mendekati satu. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk sektor-sektor tersebut menjadi sektor unggulan baru jika terus dilakukan perkembangan. Walaupun sektor basis merupakan yang paling potensial untuk dikembangkan dan

untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung, namun sektor non basis pun harus dikembangkan untuk menjadi sektor basis baru ditunjang dengan sektor basis yang sudah ada. Sektor potensial yang nilai LQ rata-ratanya mendekati satu memiliki tanda kelebihan pada tingkat spesialisasi di Kabupaten Badung sama dengan tingkat spesialisasi di Provinsi Bali.

Analisis *Shift Share* digunakan untuk menganalisis tingkat pertumbuhan masing-masing sektor yang ada di suatu daerah/wilayah, dimana teknik ini akan mengidentifikasi keuntungan lokasi dan struktur pertumbuhan ekonomi yang dimiliki suatu daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dengan menggunakan analisis shift share dipengaruhi oleh kedua komponen yaitu *proportional shift* (PS), dan *differential shift* (DS). Besarnya komponen pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.**  
**Hasil Analisis *Shift Share* Pendekatan *Proportional Shift* (PS) Sektor-Sektor**  
**Ekonomi di Kabupaten Badung Tahun 2012-2016**

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-4156979.40	3729508.03	2236210.10	-1602462.54
2	Pertambangan dan Penggalian	-19718656.93	-3027947.44	67875360.31	-20086043.40
3	Industri Pengolahan	574282.39	3302028.65	444566.82	-4903887.36
4	Pengadaan Listrik dan Gas	84543.03	58934.33	-316716.74	180457.96
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-24708.23	257892.80	-193140.28	-48515.75
6	Konstruksi	2276547.53	-4940864.28	-2433098.52	5481650.30
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2229138.74	2083172.51	433989.26	-5587925.32
8	Transportasi dan Pergudangan	4369937.45	-11903608.02	-12247395.95	21656807.94
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6516871.21	1104813.19	-2281147.22	-6831931.39
10	Informasi dan Komunikasi	-4529467.42	1231737.72	1795538.70	2414167.23
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6104946.74	-583903.04	-2856686.73	-4172279.75
12	Real Estate	-713666.32	3232329.99	255748.72	-3038286.65
13	Jasa Perusahaan	304183.02	336328.08	-124001.31	-621585.46
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-7558475.67	5664861.47	2728113.43	405398.54
15	Jasa Pendidikan	2901397.82	1940288.74	-2160633.48	-3713061.24
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	432536.46	1059267.30	-382051.45	-1445384.24
17	Jasa lainnya	-718908.92	392936.59	154472.94	294394.08
Produk Domestik Regional Bruto		-11626478.50	3937776.62	52929128.60	-21618487.04

*Sumber:* Data diolah, 2018



**Tabel 4.**  
**Hasil Analisis *Shift Share* Pendekatan *Differential Shift* (DS) Sektor-Sektor Ekonomi di Kabupaten Badung Tahun 2012-2016**

n o	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2010324 35.75	- 5592400 80.00	4125485 0.48	9215887 4.74
2	Pertambangan dan Penggalian	1127747 8.47	1326003 1.96	1956070 91.88	1061815 2.40
3	Industri Pengolahan	1259308 10.49	- 1905738 0.02	4144398 9.13	7274909 6.52
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5973700. 84	840629.0 3	5180805 .65	- 4742457 4.13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8290057. 54	- 4497301. 69	5570503 .66	- 3857350. 61
6	Konstruksi	2776581 63.43	1331009 70.99	- 7423391 1.40	- 1756043 23.78
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2076153 89.75	2202169 6.29	3851063 1.47	8861412 8.40
8	Transportasi dan Pergudangan	5117749 25.03	2852781 84.37	1458879 2.36	- 1236104 347.13
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7187852 28.43	1243188 55.16	1001312 88.86	1153870 10.74
10	Informasi dan Komunikasi	2036285 92.98	- 9084828 0.42	1471124 1.88	1706332 8.46
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8860149 7.06	4573507 9.28	2764329 4.37	1991272 9.46
12	Real Estate	1079290 13.71	- 4709670 5.06	4022716 4.25	4911107 2.23
13	Jasa Perusahaan	2204636 1.16	1962471. 84	6977541 .97	8212486. 03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9960488 2.82	7204010 903.81	3980856 8.34	3656475 2.73
15	Jasa Pendidikan	9928921 4.21	2172643 9.74	4346242 1.50	2492245 7.46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3864755 5.42	1061589. 93	1555480 7.65	1370087 6.43
17	Jasa lainnya	2115607 2.25	- 2717592 6.64	4875401 .18	731588.0 5
Produk Domestik Regional Bruto		2749241 379.31	7105401 178.56	5613144 83.24	- 9132440 42.01

Sumber: Data diolah, 2018

**Tabel 5.**  
**Matrik Hasil Analisis *Shift Share* Pendekatan *Proportional Shift* PS dan *Differential Shift* DS**

<i>Differential Shift</i> (DS)	<i>Proportional Shift</i> (PS)	
	Negatif (-)	Positif (+)
	<b>Kuadran IV Cenderung Berpotensi</b>	<b>Kuadran I Pertumbuhan Pesat</b>
<b>Positif (+)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian, kehutanan dan perikanan</li> <li>2. Pertambangan dan penggalan</li> <li>3. Industri pengolahan</li> <li>4. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor</li> <li>5. Penyediaan akomodasi dan makan minum</li> <li>6. Jasa keuangan dan asuransi</li> <li>7. Real estate</li> <li>8. Jasa perusahaan</li> <li>9. Jasa pendidikan</li> <li>10. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi dan komunikasi</li> <li>2. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib</li> </ol>
	<b>Kuadran III Terbelakang</b>	<b>Kuadran II Berkembang</b>
<b>Negatif (-)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan listrik dan gas</li> <li>2. Kontruksi</li> <li>3. Transportasi dan pergudangan</li> <li>4. Jasa lainnya</li> </ol>

*Sumber:* Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 1, 3 dan 4 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung hasil analisis shift share dengan menggunakan pendekatan PS dan DS menunjukkan maka suatu sektor ekonomi dapat dikelompokkan menjadi empat kuadran yaitu: Kuadran I (PS dan DS positif) yaitu : sektor informasi dan komunikasi ; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Hal ini

menunjukkan bahwa sektor tersebut tumbuh dengan cepat dan daya saing kuat sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi pesat.

Kuadran II (PS positif dan DS negatif) yaitu : sektor pengadaan listrik dan gas; sektor konstruksi; sektor transportasi dan pergudangan; jasa lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut tumbuh cepat, daya saing lemah sehingga sektor-sektor pada kuadran ini perlu dikembangkan lebih lanjut.

Kuadran III (PS dan DS negatif) yaitu : sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut tumbuh lambat dan daya saing lemah sehingga sektor-sektor tersebut termasuk kuadran terbelakang dengan demikian pemerintah Kabupaten Badung merancang regulasi mengenai pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang.

Kuadran IV (PS negatif dan DS positif) yaitu : sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang lambat namun daya saing kuat sehingga sektor-sektor tersebut cenderung berpotensi untuk dikembangkan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa simpulan bahwa sektor ekonomi yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Badung menggunakan analisis *LQ*, maka diperoleh hasil yaitu: sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;

sektor konstruksi; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi.

Sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Badung adalah sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate dan sektor jasa perusahaan

Berdasarkan pembahasan dan simpulan sebelumnya, dapat diberikan saran bahwa sektor basis yang terdapat di Kabupaten Badung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk itu Kabupaten Badung harus mempertahankan sektor-sektor basis tersebut, karena sektor tersebut lebih kuat menopang kondisi ekonomi. Pengoptimalan sektor basis dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Langkah yang tepat dalam mengoptimalkan sektor basis dapat dilakukan dengan cara pembenahan infrastruktur yang tersedia untuk menunjang pertumbuhan sektor tersebut.

Sektor potensial merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, karena sektor potensial dapat memberikan dampak yang positif terhadap sektor lainnya. Pemerintah Kabupaten Badung sebaiknya menyediakan anggaran lebih besar pada sektor-sektor tersebut sehingga dapat memberikan dampak positif menuju sektor basis.

## **REFERENSI**

- Afzal, M. 2007. The Impact Of Globalisation On Economic Growth Of Pakistan. The Pakistan and economic growth in Ghana. *International research journal of finance and economics*. pp 723-734.
- Almulaibari, H. 2011. Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal

Tahun 2004-2008. *Skripsi* Sarjana Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang

Andersen, Lill. and Ronald Babula. 2008. The Link Between Openness And Long-Run Economic Growth. *Journal of international commerce and economics*. pp: 31-50.

Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta :BPFE Yogyakarta

\_\_\_\_\_. 2010. *Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima*. Yogyakarta : STIE YKPN.

Aryanti, Eni. Dan Iin Indarti. 2009. Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang. *Jurnal Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi Widya Manggala*.

Asih, W. 2015. Analisis Ketimpangan Dalam Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013. *Skripsi* Sarjana Program Studi Pendidikan Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta

Ayu, Luh Nyoman Fajar Nur dan Wiagustini, Ni Luh Putu. 2016. Potensi Ekonomi Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 5 (12), hal 7551

Badan Pusat Statistik. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Badung Tahun 2012-2016*. Badung : BPS Kabupaten Badung.

Badan Pusat Statistik. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Badung Tahun 2012-2016*. Badung : BPS Kabupaten Badung.

Basuki, Agus Tri dan Utari Gayatri. 2009. Penentu Sektor unggulan Dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Daerah*, 10 (1)

Dao, Minh Quang. 2012. Population And Economic Growth In Developing Countries. *International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences*. 2.6.

Demuger, Sylvie. 2011. Infrastructure Development And Economic Growth: An Explanation For Regional Disparities In China. *Journal Of Comparative Economics* 29.1. pp. 95-117.

- Fajrii, Muhammad. 2016. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9 (2), hal: 99-107.
- Feltenstein, Andrew. and Shigeru Iwata. 2005. Decentralization And Macroeconomic Performance In China: Regional Autonomy Has Its Costs. *Journal Of Development Economics* 76.2. pp: 481-501.
- Firman, Achmad. 2007. Analisis dampak Investasi Sektor Peternakan Terhadap Perekonomi di Jawa Tengah. <https://www.scribd.com/document/39945485/08-Investasi-Jateng-Finish>. Diakses tanggal 19 Januari 2018.
- Habibullah. 2009. Industry Concentration in Rich and Poor States in Malaysia: Location Quotient and Shift Share Analyses. *The Icfai University Journal of Industrial Economics*, 6 (1), pp: 56-65
- Hardyanto. 2014. Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. *Skripsi Sarjana Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, Bengkulu*
- Herath, Janaranjana., Tesfa G. Gebremedhin dan Blessing M. Maumbe. 2011. *A Dynamic Shift Share Analysis of Economic Growth in West Virginia. Journal of Rural and Community Development*, Vol.6 No. 2, University of West Virginia. Morgantown.
- Kesuma, Ni Luh Aprilia dan I Made Suyana Utama. 2015. Analisis Sektor Unggulan Dan Pergeseran Pangsa Sektor – Sektor Ekonomi Kabupaten Klungkung. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 8 (1)
- Kusuma, Hendra. 2016. Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9 (1), hal: 1-11.
- Lawal, Tolu. and Abe Oluwatoyin. 2011. National Development In Nigeria: Issues. Challenges And Prospects. *Journal Of Public Administration And Policy Research*. 3.9. pp: 237-241.
- Mack, Richard and Jacobson, David. 1996. Core Periphery Analysis of the European Union: a Location Quotient Approach. *Journal of Regional Analysis an policy*, 26 (1), pp: 3-21.
- Mapa, Dennis S. Monica Florida B. Sandoval. and David Joseph Emmanuel B. Yap. 2009. Investigating The Presence Of Regional Economic Growth Convergence In The Philippines Using Kalman Filter. *Journal Of Development Economics*.

- Miranti, R. A. Duncan. and R. Cassells. (2014). Revisiting the Impact of Consumption Growth and Inequality on Poverty in Indonesia during Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES)*, vol 50 no 3.pp: 461-482.
- Mondal, Prof. Wali I. Ph. D. 2009.*An Analysis of The Industrial Development Potential of Malaysia: A Shift Share Approach.**Journal of Business & Economic Research* Vol. 7 No. 5 Hal.41-46, National University, USA.
- Oka, I Nengah. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*,8 (1), hal: 63-71.
- Pamuji, Teguh.2011. Analisis Sektor Unggulan dalam Struktur Perekonomian Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*,Vol. 7, No. 1, hal: 1220-1240.
- Pratomo, S. 2010 . Analisis Peran Sektor Pertanian Sebagai Sektor Unggulan di Kabupaten Boyolali Tahun 1998-2010. *Skripsi Sarjana Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta*
- Richardson. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Jakarta: FEUI
- Richardson, H. W .1979. *Regional Economics*, University Of Illinois Press, Chicago.
- Ridhwan, Masagus. 2013. Regional Dimensions of Monetary Policy in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES)*, 49 (3), pp: 386-387.
- Ron Hood, 1998. *Economic Analysis : A Location Quotient*. Primer. Principal Sun Region Associates, Inc.
- Saerofi, M. 2005. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Sektor Potensial di Kabupaten Semarang. *Skripsi Sarjana Jurusan Ekonomi pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang*
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang : Baduase Media.
- Spolaore, Enrico. and Romain Wacziarg. 2013. How Deep Are The Roots Of Economi Development. *Journal Of Economic Literature* 51.2. pp: 325-369.
- Sugiardi, Ni Putu Dwi Eka Rini dan Ni Luh Supadmi. 2014. Pengaruh PAD, DAU, dan Silpa pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.Vol 7.2, hal: 477-495.

Suharyadi, Asep, Gracia Hadiwidjaja, and Sudarmo Sumarto. 2012. Economic Growth and Poverty Reduction In Indonesia Before and After the Asian Financial Crisis. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies (BIES)*, 48 (2), pp: 209-226.

Tarigan, Robinson. 2004. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

\_\_\_\_\_.2007. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi* (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.

Wiwekananda, Ida Bagus Putu. 2016. Transformasi Struktur Ekonomi dan Sektor Unggulan di Kabupaten Buleleng Periode 2008-2013. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9 (1), pp: 37-45.